

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH LANGSUNG

Oleh : Hermi Susiatiningsih

Abstrac : *The theoretical dominance of direct local election is mainly based on western theory of democracy, local politics and development. There are plenty western theories used to analyze current Indonesian local politics, including direct local election. In fact, however, the problems of local direct election still take place in many forms of disadvantages. These problems are, for instance, money politics, riots, long conflicts, black campaigns and so forth. In order to minimize these problems, local wisdom based on Javanese values is important in contribution to solve the relevant problems. There are many Javanese value based local wisdom that may useful to be implemented.*

Keywords: *local direct elections, local wisdom, Javanese values, local politics.*

PENDAHULUAN

Teori-teori tentang demokrasi dan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia umumnya dan di Jawa Tengah khususnya banyak dipengaruhi dan didominasi oleh teori-teori barat. Tokoh-tokoh atau ahli teori politik dan demokrasi lokal atau desentralisasi banyak dikembangkan oleh para ilmuwan barat, seperti misalnya Smith, Dennis Rondinelli, Sabir Cheema, Nick Devas dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan pandangan Purwo Santoso (2011:1-4), bahwa ilmuwan barat sering menempatkan Indonesia sebagai sebuah obyek kajian yang luar biasa penting sehingga menghasilkan teori-teori besar yang diakui pada tingkat global. Sebut saja, ilmuwan-ilmuwan barat seperti Clifford Geertz, Benedict Anderson, Harold Crouch, Colin Brown, Daniel S. Lev dan sebagainya.

Bahkan Muhammad Yusuf dari Pakistan yang memperoleh hadiah nobel, melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Batu, Malang yang berkaitan dengan sistem arisan, yang dikembangkannya menjadi "Gramene Bank".

Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa local wisdom yang sesungguhnya banyak hidup dan dimiliki oleh Indonesia tidak banyak digali dan digunakan sendiri oleh masyarakat lokal yang bersaing. Local wisdom adalah kearifan lokal, yang menempatkan budaya-budaya lokal yang baik dan positif untuk dikembangkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan masyarakat.

Desentralisasi dan Pemilukadasung:

Dalam perspektif teoritik, pilkada yang

merupakan salah satu pilar demokratisasi di daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap upaya perwujudan demokrasi dan good governance di daerah. Desentralisasi diyakini mampu memberikan jalan yang terbaik dan menghasilkan berbagai keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Smith 1985: 5-8, Turner & Hulmer 1997: 87-89 & Peters, 1996: 21-25). Keuntungan ini setidaknya-tidaknya meliputi beberapa hal pokok.

Pertama, desentralisasi merupakan sarana pendidikan politik yang mengajarkan masyarakat banyak tentang arti penting peran dari debat politik, dalam seleksi kepemimpinan dalam sebuah demokrasi lokal. Sebagai sarana pendidikan politik sudah semestinya Pilkada langsung memberikan contoh-contoh positif dan elegan yang perlu terus ditumbuhkembangkan oleh seluruh elemen yang terlibat didalamnya, lebih aktor-aktor utama seperti misalnya partai politik, kandidat dan sebagainya. Realitas di lapangan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. Akan tetapi, upaya-upaya positif untuk mewujudkan tujuan ini harus tetap dilaksanakan mengingat arti penting mewujudkan moral politik yang positif dalam penyelenggaraan politik lokal.

Kedua, desentralisasi merupakan training dalam kepemimpinan politik yang akan menghasilkan pemimpin politik yang cakap dalam pembuatan keputusan, konsultasi publik dan berbagai demensi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Ini banyak dibuktikan di Amerika Serikat, yaitu bahwa cukup banyak Presiden yang sebelumnya menjabat Gubernur di negara bagian. Hal semacam ini memang perlu dikembangkan karena memang pengalaman di Indonesia training kepemimpinan politik pada jabatan-jabatan

strategis ini belum begitu terasa khususnya terjadi promosi kepemimpinan politik dari lokal ke nasional. Walaupun untuk posisi lembaga perwakilan training kepemimpinan politik ini lebih dirasakan ketimbang pada posisi kepemimpinan eksekutif.

Ketiga, dengan desentralisasi maka stabilitas politik dapat terjaga karena partisipasi yang besar dalam politik melalui demokrasi lokal. Bahkan kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat sehingga harmoni sosial, semangat kebersamaan dan stabilitas politik dapat dijaga dan ditingkatkan. Asumsi dasarnya adalah bahwa semakin besar ruang partisipasi publik dalam pilkada langsung berarti memenuhi kebutuhan partisipasi publik yang memang dibutuhkan semua level penyelenggaraan demokrasi.

Keempat, desentralisasi dapat menimbulkan kesetaraan politik (*political equality*) dari partisipasi politik yang lebih besar akan memperkecil konsentrasi kekuasaan pada lembaga tertentu. Kekuasaan politik akan lebih tersebar sehingga mereka yang miskin dan tertindas dapat memperoleh manfaatnya. Pada titik tertentu, sebenarnya hal ini merupakan pembelajaran bahwa pemimpin tidak perlu arogan, dan rakyat tidak perlu rendah diri. Disinilah sebenarnya makna dari kesetaraan politik itu.

Kelima, desentralisasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan karena masyarakat lokal terintegrasikan pada sistem desentralisasi yang memang mempromosikan partisipasi masyarakat lokal, peningkatan pelayanan publik dan akses lokal yang lebih besar.

Terakhir, desentralisasi akan meningkatkan kepekaan pemerintah (*responsiveness*) karena perwakilan rakyat lokal yang mengetahui lebih banyak kebutuhan dan situasi lokal dan bagaimana cara memanager-nya secara efektif efisien. Konsen-konsen agar perwakilan rakyat daerah terap berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya menjadi penting. Pengalaman pahit selama ini memang perwakilan daerah lebih banyak mewakili kepentingan sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Pemilihan kepala daerah langsung yang merupakan salah satu implementasi dari deentralisasi politik sebagaimana pandangan ilmuwan Barat diatas sesungguhnya menunjukkan bahwa suatu idealisme yang baik, positif dan sempurna. Pemilu langsung diyakini banyak menghasilkan dampak-dampak positif yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat daerah.

Pemilihan umum kepala daerah langsung

merupakan bagian dari implementasi desentralisasi daerah yang diyakini membawa banyak dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mereka meyakini bahwa pemilihan umum pemilu dapat membawa banyak dampak positif seperti peningkatan partisipasi politik lokal yang sejati (tidak semu), seleksi kepemimpinan politik lokal yang demokratis, berkembangnya pasokan pemimpin yang memadai untuk tingkat nasional, berkembangnya budaya politik lokal yang kuat untuk menopang budaya politik nasional dan tersedianya kepastian peningkatan kesejahteraan rakyat daerah (Rondinelli, Nellis & Cheema 1983:9-12).

Pemilu langsung akan memperkuat dan menghasilkan partisipasi politik yang sejati oleh karena mereka benar-benar terlibat langsung dalam proses politik lokal sehingga mereka lebih punya komitmen dan tanggungjawab untuk ikut serta dalam proses politik lokal ini. Partisipasi mereka menjadi sangat intens dan mendalam karena kepentingan mereka langsung bisa disalurkan melalui partisipasi politik ini (Robertson 2000:87-91).

Dengan jangkauan wilayah daerah dan jumlah penduduk yang lebih terbatas maka seleksi kepemimpinan politik ditingkat lokal melalui pemilu langsung akan lebih baik dan terjamin karena pemimpin daerah yang terpilih diyakini lebih mengetahui persolan-persoalan lokal yang terjadi di suatu daerah. Dengan kata lain intensitas hubungan yang sering antara rakyat dan pemimpin daerahnya memungkinkan proses seleksi kepemimpinan politik yang lebih baik.

Berkembangnya pasokan pemimpin melalui pemilu diyakini mampu berjalan dengan baik untuk mendukung kebutuhan akan pemimpin nasional. Pemimpin daerah yang berhasil sangat mungkin meningkat dan dibutuhkan untuk memasok calon-calon pemimpin pada tingkat nasional. Sangat memungkinkan pemilu yang berhasil mampu menghasilkan para bupati/walikota untuk menjadi gubernur, para gubernur yang sukses juga bisa menjadi pasokan yang baik untuk menjadi calon-calon pemimpin nasional baik presiden, wakil presiden maupun menteri-menteri.

Berkembangnya budaya politik lokal yang demokratis diyakini oleh banyak pihak ditentukan oleh salah satunya pemilu langsung yang baik dan demokratis. Dengan pemilu langsung yang demokratis sangat memungkinkan terbentuk perilaku dan orientasi politik lokal yang berkembang baik dan positif.

Peningkatan kesejahteraan rakyat akan menjadi realistis terwujud manakala pemilukada mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan sensitif serta empati kepada kebutuhan masyarakat. Pada titik yang paling ideal pemilukada yang sukses akan menghasilkan pemimpin yang baik, yang didukung dan dicintai masyarakatnya.

Namun demikian, dari kesekian banyak idealisme positif tentang pemilukada langsung diatas ternyata tidak serta merta mampu diwujudkan dalam konteks politik dan pemerintahan di daerah sekarang ini. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu dampak negative atau sisi-sisi buruk pemilukada banyak bermunculan dalam praktek politik di daerah. Fakta-fakta semacam inilah yang barangkali sejalan dengan pemikiran Michael Mann (2004: 1-10) bahwa demokrasi tidak selalu ideal, karena memang mampu memunculkan apa yang disebutnya sebagai *the dark side of democracy*.

Sisi-sisi buruk dari demokrasi langsung dalam pemilukada langsung paling tidak dapat dilihat dari praktik-pratik mengenai intensitas budaya transaksionalisme politik yang tinggi (*money politics*), intensitas *black campaigns* yang juga cukup tinggi, perjudian politik melalui “perbotohan” (spekulasi politik) yang kuat dan banyaknya motivasi pemimpin yanghanya mencari kekayaan sehingga banyak pemimpin yangdihasilkan melalui pemilukada langsung terjerat dalam persoalan korupsi yang akut.

Transaksionalisme saat ini berkembang sangat pesat hampir dalam semua praktek pemilu langsung di Indonesia khususnya pemilukada, pemilupres/wapres dan juga pemilu legislative. Banyak pihak yang menyatakan bahwa sangat tidak mungkin menghapuskan budaya politik kuat yang sudah mendarahdaging dalam politik nasional dan lokal Indonesia ini (Ginting 2012:1-2).

Ketiadaan moralitas politik yang kuat dan dorongan pemikiran yang penting menang dalam pemilukada telah mendorong terjadinya kampanye hitam yang parah. Target akhirnya tentu menjatuhkan lawan yang punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Salah satu cara instan untuk mengalahkan kandidat yangkuat dan populer adalah *black campaign*, disamping serangan politik uang (Solo Pos 2012; .

Motivasi mencari kekayaan atau harus mengembalikan biaya “hutang politik” yang cukup banyak mengeluarkan ongkos menimbulkan kecenderungan pemimpin hasil pemilukada menghalalkan segala cara untuk mengeruk uang demi kekayaan sebanyak dan

secepat mungkin. Akibatnya mereka melanggar mekanisme hukum dan kewajaran yang timbul dalam sistem sosial politik, yang berdampak mereka menjadi tersangka atau narapidana kasus korupsi (Tempo 2012; Kompas 2012).

PEMBAHASAN

Untuk merespon berbagai persoalan yang menyangkut praktik implementasi pemilihan kepala daerah langsung diatas guna memperbaiki situasi dan kondisi politik lokal yang kian carut marut, maka salah satu solusi yang ditawarkan adalah mencoba menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis pada kondisi masing-masing daerah dalam implementasi pemilukada langsung.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat atau aturan-aturan khusus yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tercapai kebaikan atau harmoni sosial. Kearifan lokal berasal dari kata local (lokal atau daerah tertentu) dan *wisdom* (kearifan atau kebijaksanaan).

Prof. Nyoman Sirtha (dalam Sartini 2004:112-113) menyatakan bahwa kearifan lokal mempunyai beberapa fungsi dan makna, yaitu:

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam
2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep.
3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan
5. Bermakna sosial misalnya pada upacara daur pertanian
6. Bermakna etika dan moral.
7. Bermakna politik, misalnya tentang hubungan kekuasaan patron dan client.

Dalam konteks NKRI, banyak nilai-nilai lokal pada masing-masing daerah yang bisa dikembangkan secara positif dan efektif untuk membantu mengatasi berbagai persoalan pemilukada tersebut. Setiap daerah pasti memiliki keragaman budaya lokal yang baik dan positif untuk mengatasi masalah-masalah publik termasuk persoalan-persoalan pemilukada langsung.

Dalam konteks Jawa Tengah maka nilai-nilai kearifan lokal yang bisa dikembangkan

dalam rangka membantu mengatasi persoalan-persoalan negative pemilukada langsung adalah sebagaimana berikut ini.

1. *Yen menang aja umuk, yen kalah aja ngamuk.*

Maksudnya adalah bahwa jika menang jangan sombong, arogan dan jika kalah jangan mengamuk atau merusak. Local wisdom berbasis nilai-nilai Jawa ini sesungguhnya amat positif dan mendukung berbagai upaya positif untuk menjaga iklim kondusif dan mencegah terjadinya konflik pasca pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

Jika para pihak yang saling berkompetisi bisa menahan diri dan saling menghormati sebagaimana makna diatas maka iklim kondusif dan stabilitas politik selama proses pemilukada langsung akan tetap terjaga dengan baik. Dengan sikap tidak sombong dan tidak mudah mengamuk merupakan nilai-nilai dasar Jawa yang penting dan utama untuk memperbaiki carut marut implementasi pemilukadasung sekarang ini.

2. *Jer basuki mawa bea.*

Makna dari local wisdom Jawa ini adalah bahwa untuk sukses dibutuhkan pengorbanan. Bea dalam dalam konteks ini adalah modal atau pengorbanan, yang bukan berarti hanya uang saja, tetapi bisa berupa modal materi, modal tenaga (usaha), pengorbanan dan sebagainya. Kandidat yang menang karena tanpa lelah berkeliling bersilaturahmi ke berbagai kalangan masyarakat dari pagi hingga larut malam sesungguhnya merupakan bea juga. Bea juga bisa diartikan sebagai suatu modal awal atau investasi awal.

Nilai kearifan lokal di balik ini dan bermakna sangat penting untuk memenangi pemilukada langsung adalah bahwa untuk menang, kandidat harus bekerja keras, harus berusaha, harus berkorban untuk kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan suatu sikap yang tidak instan. Artinya pemimpin yang menang adalah pemimpin yang lengkap, bukan pemimpin yang instan, dimana menang dengan cara instan pula. Cara instan tersebut misalnya membeli suara atau pun kampanye hitam.

3. *Ana rembug dirembug*

Prinsip pemahaman dari makna local wisdom ini adalah bahwa semua hal sesungguhnya bisa diselesaikan melalui

proses komunikasi politik yang baik. Ana rembug dirembug, artinya adalah musyawarah, dialog atau berdiskusi untuk mencari kesepakatan.

Makna local wisdom berbasis Jawa ini sangat baik dan positif untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut pemilukada langsung. Mispersepsi sangat mungkin terjadi dalam ketatnya kompetisi politik. Melalui komunikasi, diskusi dan berembug inilah sesungguhnya kesepakatan dapat dicapai sehingga persoalan dapat diselesaikan.

4. *Menang tanpa ngasorake.*

Pengertian dari local wisdom ini sesungguhnya adalah menang, tetapi tidak mengalahkan. Makna utamanya adalah seperti konsep win-win solution. Maksudnya akhir kompetisi harusnya semua pihak siap kalah dan siap menang. Artinya yang kalah, tidak merasa dikalahkan, yang menang, juga tidak merasa paling top, paling jagoan.

Nilai kearifan lokal ini sangat baik dan urgent untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut persolan perebutan jabatan publik melalui pemilukada langsung.

5. *Pemimpin sing bisa ngayomi lan ngayemi nganggo watak asthabrata, berbudi bawa laksana.*

Makna dibalik local wisdom ini adalah bahwa pemimpin harus bisa melindungi, membuat rakyatnya tenteram, tenang dan damai, berwatak asthabrata dimana berbudi baik, memahami dengan baik dan mampu melaksanakannya dengan baik.

Ini merupakan pendidikan politik berbasis Jawa yang sangat penting khususnya ketika masyarakat dihadapkan pada kriteria untuk memilih pemimpinnya.

Watak asthabrata mengajarkan sifat pemimpin agar para pemimpin memiliki dan mencontoh watak seperti (www.sosbud.kompasiana.com/falsafahjawa/2010/08/31):

Pertama, bumi. Seorang pemimpin harus bersifat seperti bumi yaitu menjadi pengayoman, pemurah dan sumber hidup bagi pengikutnya.

Kedua, angin. Artinya, pemimpin harus bersifat kuat, bersahaja, selalu dapat mencermati setiap permasalahan dan berani menyuarakan kepentingan masyarakat.

Ketiga, samudra. Artinya, seorang pemimpin harus berpandangan luas, berwawasan luas, berhati luas seluas samudra, tidak mudah

tersinggung bila dikritik, tidak terlena oleh sanjungan, mampu menampung semua aspirasi rakyat dan golongan manapun serta bersifat pemaaf.

Keempat, bulan. Artinya, seorang pemimpin harus lembut, ramah, sabar, selalu rendah hati dan berbudi luhur serta menebarkan suasana tenang dan teduh bagi masyarakat.

Kelima, matahari. Artinya, seorang pemimpin harus bisa memberikan pencerahan kepada rakyat, berhati-hati dalam bertindak seperti jalannya matahari yang tidak tergesa-gesa tapi pasti dalam memberikan sinar cahayanya pada semua makhluk tanpapelih kasih.

Keenam, langit. Artinya, seorang pemimpin harus berwibawa dan menakutkan bagi siapa saja yang berbuat salah atau melanggar peraturan.

Ketujuh, api. Artinya, seorang pemimpin harus berani tegas bertindak pada siapapun tanpa pilih kasih dengan berpijak pada kebenaran dan keadilan.

Kedelapan, bintang. Artinya, seorang pemimpin harus menjadi sumber contoh, budaya dan tingkah laku yang baik. Bercita-cita tinggi untuk mencapai kemajuan bangsa, tidak mudah terombang ambing, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Tidak bisa dipungkiri teori-teori tentang demokrasi, desentralisasi dan pemilukada langsung berasal dari dunia Barat dan banyak ditumbuhkembangkan oleh para ilmuwan Barat. Namun demikian, untuk mengatasi berbagai persoalan demokrasi, desentralisasi dan pemilihan kepala daerah langsung juga dibutuhkan local wisdom yang berbasis nilai-nilai Jawa untuk membantu mengatasinya.

Nilai-nilai kearifan lokal berbasis Jawa tersebut antara lain *yen menang aja umuk yen kalah aja ngamuk; jer basuki mawa bea; ana rembug dirembug, menang tanpa ngasorake*, pemimpin *sing bisa ngayomi lan ngayemi nganggo watak asthabrata, berbudi bawa laksana*.

Daftar Pustaka

- Ginting, D. 2012, "Fenomena Jokowi dan Money Politics dalam Pilkada" dalam Kompas, Kompasiana.com/post/politik/2012/09/18/fenomena. 18 September 2012.
- Mann, M. 2004, *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Peters, B.G. 1996, *The Future of Governing: Four Emerging Models*, University of Kansas, Kansas, USA
- Robertson, D. 2000, *Dictionary of Politics*, Penguin Books, London
- Rondinelli, JR Nellis & G Shabbir Cheema 1983, *Decentralization in Developing Countries*, World Bank, Washington DC
- Santoso, P. 2011, "Ilmu Sosial Transformatif", Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Sartini, "Menggalai Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati" dalam *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37 No. 2., hlmn 111-119.
- Smith T.M. 1990, *Decentralisation, Tradition and Change in Indonesia*, Transaction Publishers, New Brunswick, USA.
- Turner M. & Hulme D. 1997, *Governance, Administration and Development*, Kumarian Press, University of Michigan, USA
- Sumber media massa:
- Kompas, 2012, "173 Kepala Daerah Hasil Pilkada Tersangkut Korupsi", Rabu, 09 Mei 2012. (.)
- Solo Pos, 2012, "Pilkada DKI: Isu SARADan Black Campaign Marak, Panwaslu Angkat Tangan", Rabu 25 Juli 2012. (<http://.solopos.com/2012/07/25/pilkada>).
- Tempo, 2012, "ICW: Dua Potensi Korupsi di A j a n g P i l k a d a " (www.tempo.co/read/news/2012/07/03/228414569/). Selasa, 03 Juli 2012.